



Desakan PSBB di DIY Menguat

JOGJA—Kasus harian positif Covid-19 di DIY kembali memecahkan rekor pada Selasa (29/12). Menjelang malam Tahun Baru 2021, Jogja diperkirakan tetap diserbu wisatawan. Wacana pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kian menguat.

*Luqas Subarkah & Catur Dwi Janati
redaksi@harianjogja.com*

Pada Selasa (29/12), DPRD DIY menggelar rapat menghadirkan Pemda DIY termasuk Sekda DIY, Kadamanta Baskara Aji, untuk menyampaikan saran tentang langkah tegas yang harus segera diambil Pemda DIY menjelang libur akhir tahun.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudianta, mengatakan seluruh fraksi dan komisi di DPRD DIY sepakat mengusulkan pembatasan pergerakan manusia dan penambahan kapasitas rumah sakit.

"Seberapa pun kapasitas disiapkan, kalau tidak ada pembatasan pergerakan manusia tetap tidak

▶ Pemda DIY menggelar rapat hari ini untuk membahas kemungkinan PSBB.

▶ Pemkot Jogja mengkaji penutupan pusat kerumunan pada malam Tahun Baru 2021.

akan cukup. Sehebat apapun kita, kami mesti menyampaikan opsi, selama kenaikan [tambahan kasus positif Covid-19 harian] 200-an, mesti ada opsi pembatasan pergerakan manusia. Protokol kesehatan saja tidak cukup," katanya.

Kemarin, DIY mencatat rekor kasus positif harian sejak virus ini terdeteksi di provinsi ini sembilan bulan lalu.

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY mengumumkan 282 penambahan kasus.

Menurut Huda, yang diperlukan DIY saat ini adalah ketegasan langkah, karena berbagai instruksi sudah dikeluarkan Gubernur dan petugas di lapangan juga sudah kelelahan, bahkan banyak yang ikut terpapar Covid-19.

▶ Halaman 11

Desakan PSBB...

"Objek wisata menjadi sumber kerumunan, kalau tidak mampu melakukan pembatasan, lebih baik ditutup. Merayakan tahun baru dengan melihat tvi dan *handphone* lebih aman. Yang diperlukan saat ini ketegasan. Gugus tugas silakan memikirkan opsi pembatasan pergerakan manusia, terutama waktu tahun baru besok," ujarnya.

Ia menjelaskan dalam kondisi normal, penerapan sanksi bagi pelanggaran protokol kesehatan masih bisa dilakukan. Namun di DIY, misalnya di Malioboro yang seramai akhir pekan libur Natal kemarin, petugas sudah tidak mungkin mengontrol karena jumlah pengunjung puluhan kali lipat lebih banyak.

DPRD juga mendesak penambahan kapasitas rumah sakit baik kamar tidur maupun tenaga kesehatan. "Ini untuk *njagati* [mengantisipasi] kasus yang kemarin-kemarin. Kalau yang akan datang kami enggak *ngerti*. Makanya jangan sampai terjadi lonjakan kasus," ujar dia.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengatakan Pemda DIY bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi kesehatan untuk meningkatkan jumlah dokter dan perawat. "Dengan perpanjangan status tanggap darurat per Januari 2021, Pemda bisa menggunakan BTT [belanja tak terduga APBD 2020] Rp62 miliar."

Pemda DIY akan mengadakan rapat penentuan PSBB pagi hari ini, Rabu (30/12). Pembatasan mobilitas masyarakat butuh banyak langkah karena pintu masuk ke wilayah DIY cukup banyak.

"Kami belum punya rumus pembatasan dari Magelang [Jawa Tengah] masuk ke Jogja. Jika dibatasi, [orang-orang] mencari tempat lain [untuk masuk ke DIY]. Strategi ini harus kami

cari. Masukan sudah cukup banyak, besok pagi kami akan rapat di Bappeda [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] untuk menindaklanjuti [saran pemberlakuan PSBB]," kata Sekda DIY, Kadamanta Baskara Aji.

Menurut dia, pembatasan pergerakan manusia sebenarnya sudah diterapkan lewat syarat *swab* antigen bagi pelaku perjalanan. Pembatasan juga bisa berupa penutupan Tugu Pal Putih hingga Titik Nol Kilometer pada malam Tahun Baru sebagaimana saran DPRD Kota Jogja.

Dengan perpanjangan status tanggap darurat per Januari 2021, Pemda bisa menggunakan BTT [belanja tak terduga APBD 2020] Rp62 miliar.

Eko Suwanto

Ketua Komisi A DPRD DIY

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, mempersilakan Tugu hingga Titik Nol Kilometer ditutup total untuk sementara. "Sah-sah saja, silakan itu kewenangan Kota Jogja, asal DPRD dan pemerintah daerah kompak," ujar Sultan.

Ihwal usulan PSBB, Sultan menilai kebijakan ini harus dipikirkan masak-masak. "Kami pertimbangkan implikasinya," ujarnya.

Penutupan Tugu

Pemkot Jogja masih mengkaji rekomendasi DPRD untuk menutup total Tugu Pal Putih sampai Titik Nol Kilometer pada malam tahun baru nanti.

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti

menilai langkah paling penting adalah memonitor kerumunan alih-alih menutup kawasan. "Pembatasan dilakukan untuk menghindari kerumunan. Oke kami kaji pembatasan, tetapi yang paling penting adalah tim satgas siap memonitor [kerumunan]," ujar dia, Selasa.

Pengawasan atau monitor akan dilakukan setiap saat, bukan hanya menjelang dan setelah perayaan tahun baru.

"Saya lebih memilih kita berkompromi dengan keadaan. Penjagaan lebih penting daripada pembatasan. Orang tidak senang dibubarkan, kami juga tidak senang membubarkan. Aparat kami, TNI dan Polri, bukan aparat pembubar," ucap dia.

Wakil Wali Kota Jogja sekaligus Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Jogja, Heroe Poerwadi, mengatakan pemerintah masih mengkaji usulan penutupan beberapa kawasan yang selama ini menjadi pusat kerumunan.

"Kami sedang mengkaji usulan penutupan kawasan Tugu, Malioboro, dan Alun-Alun Utara. Selama ini, Tim Satgas sudah mengkaji penataan arus lalu lintas selama perayaan Natal dan Tahun Baru, termasuk tata cara mengurangi kemacetan dan kerumunan," kata dia.

Menurut Heroe, penutupan lokasi-lokasi yang biasa jadi tujuan khalayak, justru berpotensi memindahkan kerumunan ke tempat lain.

"Sebab kawasan tersebut memang kawasan utama Kota Jogja. Jika ditutup, kami harus mempersiapkan implikasinya. Misalnya kawasan Tugu, Malioboro sampai Alun-Alun Utara ditutup, itu akan mengakibatkan limpahan arus pada ruas jalan lain. Aktivitas masyarakat di malam tahun baru juga berpotensi bergeser di tempat lainnya."

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPBD			

Yogyakarta, 16 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005